



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

(Merupakan bentuk pertanggungjawaban Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Bali terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2018, dan dapat dijadikan bahan acuan dalam mengevaluasi kinerja ditahun tahun mendatang)

2018

LKjIP

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Bali

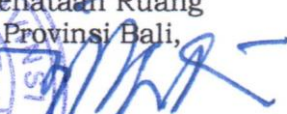
KATA PENGANTAR



Pujastuti Angayubagya kami haturkan kehadiran Ida Sang Hyang Widhi Wasa/ Tuhan Yang Maha Esa atas Asung Kerta Wara Nugraha-Nya, sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Bali Tahun Anggaran 2018 dapat diselesaikan dengan baik dan tepat pada waktunya.

Keterlibatan semua jajaran dilingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Bali sangat membantu dalam penyusunan LKjIP ini dan untuk itu kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh Bidang, Sekretariat, Unit Pelaksana Teknis (UPT) serta semua staf Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Bali yang membantu secara maksimal dalam pelaksanaan kegiatan guna mencapai target kinerja yang telah ditetapkan hingga pada akhirnya dapat disusun LKjIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Bali Tahun Anggaran 2018.

LKjIP disamping sebagai Laporan Kinerja juga merupakan cerminan realisasi dari rencana kegiatan yang telah dijalankan pada tahun 2018. Capaian Target Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Bali diharapkan senantiasa meningkat dari tahun ke tahun serta mampu menyajikan data-data dan informasi yang semakin maksimal sehingga dapat menghasilkan LKjIP yang lebih baik sebagai wujud adanya peningkatan kinerja.

Denpasar, 11 Pebruari 2019
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Provinsi Bali,

Ir. I Nyoman Astawa Riadi, M.Si.
Pembina Utama Madya
NIP. 19600916 198012 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
IKHTISAR EKSEKUTIF.....	iii
BAB I URAIAN SINGKAT ORGANISASI.....	1
1.1 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi.....	1
1.2 Tugas Pokok dan Fungsi.....	2
1.3 Issu Strategis.....	3
1.4 Struktur Organisasi.....	4
BAB II PERJANJIAN KINERJA.....	6
2.1 Perjanjian Kinerja Tahun 2018.....	6
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	9
3.1 Pengukuran Capaian Kinerja.....	9
3.2 Analisis Capaian Kinerja.....	11
3.3 Realisasi Keuangan.....	31
BAB IV PENUTUP.....	35
LAMPIRAN – LAMPIRAN :	
Lampiran I : Struktur Organisasi Dinas PUPR Provinsi Bali	
Lampiran II : Perjanjian Kinerja Tahun 2018	

IKTHISAR EKSEKUTIF

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Bali mempunyai peran yang sangat strategis dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Bali, dimana Dinas PUPR Provinsi Bali berperan dalam bidang Infrastruktur, yang meliputi infrastruktur Jalan, sumber daya air, penyediaan sarana dan prasarana air minum dan air limbah, penataan bangunan dan lingkungan, pengelolaan sistem penyediaan air minum, pengelolaan sistem air limbah perpipaan terpusat, Pengelolaan Sampah, pengujian kualitas air dan bahan bangunan serta penyewaan alat berat.

Rencana Strategi (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Bali Tahun 2014-2018 merupakan Dokumen Perencanaan Strategi yang disusun dan dirumuskan setiap lima tahun (perencanaan jangka pendek) yang menggambarkan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan. Visi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Bali adalah : “Mewujudkan Infrastruktur Pekerjaan Umum yang handal untuk kehidupan yang produktif, berkelanjutan dan sejahtera berlandaskan konsep Tri Hita Karana menuju Bali Mandara”. Seiring dengan perubahan kondisi dan perubahan struktur perangkat daerah maka dilakukan review terhadap Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Bali, namun perubahan yang terjadi menitikberatkan terhadap target yang hendak dicapai, hal ini disebabkan oleh Keterbatasan Anggaran yang diperoleh disetiap tahunnya tidak sesuai dengan target awal yang ditetapkan, sehingga dipandang perlu untuk melakukan review tersebut.

Untuk mencapai target Renstra 2014-2018, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Bali telah menyusun Perjanjian Kinerja. Perjanjian Kinerja Tahun 2018 terdiri dari 6 sasaran strategis yang ingin dicapai sebagai berikut :

1. Mantapnya kondisi Infrastruktur
2. Meningkatnya pengendalian abrasi
3. Meningkatnya pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis provinsi
4. Ketersediaan dan ketercukupan insfrastruktur.
5. Meningkatnya kualitas pelayanan publik
6. Meningkatnya kompetensi SDM penyelenggara Jasa Konstruksi

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang disusun merupakan perwujudan pertanggungjawaban Kepala Perangkat Daerah terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2018, yang telah ditetapkan di awal tahun dan juga merupakan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada setiap Perangkat Daerah, berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai.

Capaian indikator kinerja terhadap 6 (enam) sasaran strategis yang telah ditetapkan, menjadi tolok ukur keberhasilan dari apa yang ditetapkan di awal tahun anggaran. Capaian dari masing-masing indikator sebagian besar diatas 97%, walaupun masih terdapat beberapa capaian yang lebih kecil dari 91%, namun secara umum semua kegiatan dapat berjalan dengan baik. Capaian ini akan dijadikan pedoman pada apa yang akan direncanakan dan ditetapkan pada tahun anggaran berikutnya, untuk mencapai target Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Bali tahun 2014-2018.

Dengan pagu anggaran sebesar Rp. 342.530.765.816,73 bersumber dari dana APBD Provinsi Bali dapat direalisasikan sebesar Rp. 325.138.721.622,52 atau sebesar 94,92% sehingga terjadi efisiensi sebesar 5,08 %.

BAB I

URAIAN SINGKAT ORGANISASI

1.1. DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROVINSI BALI

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 91 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Bali, merupakan salah satu dari 46 Perangkat Daerah yang ada di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali. Dinas PUPR merupakan Perangkat Daerah yang bertugas melaksanakan pembangunan dibidang infrastruktur. Dalam perencanaan pembangunan infrastruktur, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Bali memperhatikan keseimbangan berbagai aspek lingkungan untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan dan akuntabel. Pembangunan daerah merupakan bagian dari pembangunan nasional yang meliputi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, untuk meningkatkan harkat dan martabat serta memperkuat jati diri dan kepribadian masyarakat Bali, dalam pendekatan lokal, nasional dan global.

Sejalan dengan amanat Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme dan diterbitkannya Inpres Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah, maka Dinas PUPR Provinsi Bali beserta jajarannya telah menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas PUPR Provinsi Bali periode tahun 2018 dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja sesuai dengan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan.

LKjIP ini merupakan bentuk pertanggungjawaban Kepala Perangkat Daerah terhadap Perjanjian Kinerja 2018, yang dilaksanakan oleh Bidang, UPT dan Sekretariat dilingkungan Dinas PUPR Provinsi Bali. LKjIP memiliki manfaat yang sangat penting, disamping sebagai dokumen pelaksanaan anggaran, juga untuk

menunjukkan sejauh mana keberhasilan/capaian pelaksanaan program/kegiatan terhadap Target Kinerja yang telah ditetapkan di awal tahun anggaran dengan mengacu pada :

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi pemerintah;
- Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
- Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 29 tahun 2010 tentang pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- Surat Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : KEP-135/M.PAN/9/2004 tentang Pedoman Umum Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

1.2. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Berdasarkan Peraturan Gubernur Bali Nomor 91 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Bali dan Peraturan Gubernur Bali Nomor 128 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Rincian Tugas Pokok UPT di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Bali Secara singkat dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Tugas Pokok

Dinas mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang yang menjadi kewenangan daerah, serta melaksanakan tugas dekonsentrasi sampai dengan dibentuk Sekretariat Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dan melaksanakan tugas pembantuan sesuai bidang tugasnya.

2. Fungsi

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang yang menjadi kewenangan Provinsi;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang yang menjadi kewenangan Provinsi;
- c. Penyelenggaraan administrasi Dinas bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
- d. Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Dinas; dan
- e. Penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

1.3. ISSU STRATEGIS

Beberapa Issu Strategis yang muncul pada Bidang Infrastruktur sebagai berikut:

1. Belum terpenuhinya target kondisi dan kapasitas Infrastruktur Pekerjaan Umum;
2. Belum optimalnya akses dan kualitas layanan air minum, sanitasi dan sarana penunjang ke-PU-an;
3. Belum optimalnya daya saing para pelaku jasa konstruksi;
4. Belum optimalnya tertib pengaturan, pelaksanaan dan pemanfaatan ruang.

Permasalahan yang dihadapi secara umum oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Bali yang mempengaruhi capaian kinerjanya antara lain :

1. Masih terdapat ruas jalan provinsi yang memiliki kondisi belum mantap sepanjang 122,05 Km atau sebesar 16,42 % dari ruas panjang jalan provinsi 743,34 Km
2. Masih terdapat wilayah pantai yang terabrasi dan belum tertangani, yang membutuhkan anggaran yang sangat besar;

1.4. STRUKTUR ORGANISASI

Untuk melaksanakan tugas pokok, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja tersebut, sesuai dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 91 Tahun 2016, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Bali dibantu oleh :

1. Sekretariat Dinas PUPR;
2. Bidang Bina Konstruksi;
3. Bidang Sumber Daya Air;
4. Bidang Bina Marga;
5. Bidang Cipta Karya;
6. Bidang Tata Ruang;
7. UPT. Balai Peralatan dan Pengujian;
8. UPT. Pengelolaan Air Minum;
9. UPT. Pengelolaan Air Limbah;
10. UPT. Pengelolaan Sampah.

Secara rinci Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum terdapat pada **Lampiran 1**

BAB II

PERJANJIAN KINERJA

Dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah disebutkan bahwa Perjanjian Kinerja merupakan lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Tujuan Perjanjian Kinerja adalah

- Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur;
- Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
- Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
- Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja pemberi amanah;
- Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Perjanjian Kinerja dapat direvisi atau disesuaikan dalam hal terjadi kondisi sebagai berikut :

- Terjadi pergantian atau mutasi pejabat;
- Perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran (perubahan program, kegiatan dan alokasi anggaran);
- Perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran.

2.1 PENETAPAN KINERJA

Dalam melaksanakan tugasnya, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Bali mempunyai 15 (lima belas) program utama yang menjadi prioritas untuk dilaksanakan guna mencapai target kinerja yang ditetapkan. Pada tahun anggaran berjalan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Bali menetapkan Perjanjian Kinerja tahun 2018 sebagai rancangan awal target kinerja kegiatan di masing-masing Bidang, UPT, Sekretariat dan didukung dengan penganggaran dari APBD Provinsi Bali sebesar Rp. 367.492.850.600,00 Perjanjian Kinerja yang telah dirancang diawal tahun mengalami perubahan, karena di bulan Oktober 2018 terjadi Perubahan Anggaran menjadi Rp. 342.530.765.816,73 Jika dicermati anggaran yang mendukung untuk mencapai target dari indikator kinerja yang telah ditetapkan, mengalami pengurangan sebesar Rp. 24.962.084.783,27 yang diakibatkan oleh adanya rasionalisasi anggaran pada saat perubahan Anggaran Tahun 2018 (DPPA 2018) dampak dari adanya inflasi sebesar 1,07% di Provinsi Bali.

Penetapan Kinerja Tahun 2018 terdiri dari 6 sasaran strategis yang ingin dicapai , yaitu :

SASARAN STRATEGIS 1	
Mantapnya kondisi Infrastruktur	
Indikator Kinerja	Target
Rasio jaringan irigasi dalam kondisi baik (%)	75%

Jumlah penambahan kapasitas penyediaan air baku (m3)	160.000 m3
Prosentase Jalan provinsi dalam kondisi mantap (baik dan sedang)	85,54 %
Prosentase kehandalan bangunan gedung negara	75,61 %

SASARAN STRATEGIS 2**Meningkatnya pengendalian abrasi**

Indikator Kinerja	Target
Prosentase panjang pantai yang tertangani dari ancaman abrasi	57,46 %

SASARAN STRATEGIS 3**Meningkatnya pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis nasional**

Indikator Kinerja	Target
Prosentase kesesuaian pelaksanaan infrastruktur dengan rencana tata ruang	100,00 %

SASARAN STRATEGIS 4**Meningkatnya Ketersediaan dan ketercukupan insfrastruktur.**

Indikator Kinerja	Target
Prosentase penduduk yang berakses air limbah di Provinsi Bali	90,00 %
Prosentase penduduk yang berakses air minum di Provinsi Bali	87,00 %
Prosentase cakupan layanan pengelolaan sampah di Provinsi Bali	80,00 %

SASARAN STRATEGIS 5**Meningkatnya kualitas pelayanan publik**

Indikator Kinerja	Target
Prosentase responden yang puas terhadap kualitas hasil layanan laboratorium pengujian dan alat berat	100,00 %
Prosentase responden yang puas terhadap pelayanan air limbah	100,00 %
Prosentase konsumen yang puas terhadap pelayanan air minum	100,00 %
Prosentase responden yang puas terhadap pelayanan pengolahan persampahan	100,00 %

SASARAN STRATEGIS 6**Meningkatnya kompetensi SDM penyelenggara Jasa konstruksi**

Indikator Kinerja	Target
Jumlah Masyarakat Jasa Konstruksi yang berkompeten dan Bersertifikat di Provinsi Bali	350 orang

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan wujud nyata Instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan kepada pemberi mandat atas pelaksanaan kegiatan dan program dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran dalam suatu media pelaporan. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas PUPR Provinsi Bali tahun 2018 ini didasarkan kepada evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Tahunan yang telah ditetapkan sebelumnya serta setelah berakhirnya pelaksanaan kegiatan tahun anggaran 2018.

3.1. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA

Pengukuran terhadap tingkat Capaian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Bali tahun 2018 dilakukan dengan dengan membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Bali tahun 2018 dengan realisasinya. Tingkat capaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Bali tahun 2018 berdasarkan hasil pengukurannya dapat dilihat pada uraian berikut ini :

SASARAN STRATEGIS 1			
Mantapnya kondisi Infrastruktur			
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Rasio jaringan irigasi dalam kondisi baik (%)	75,00%	71,51%	95,35
Jumlah penambahan kapasitas penyediaan air baku (m3)	160.000 m3	189.425 m3	118,39
Prosentase Jalan provinsi dalam kondisi mantap (baik dan sedang)	85,54 %	80,81%	94,47

Prosentase kehandalan bangunan gedung negara	75,61 %	74,55%	98,59
--	---------	--------	-------

SASARAN STRATEGIS 2**Meningkatnya pengendalian abrasi**

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Prosentase panjang pantai yang tertangani dari ancaman abrasi	57,46 %	57,46%	100,00

SASARAN STRATEGIS 3**Meningkatnya pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis provinsi**

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Prosentase kesesuaian pelaksanaan infrastruktur dengan rencana tata ruang	100,00 %	100,00 %	100,00

SASARAN STRATEGIS 4**Ketersediaan dan ketercukupan infrastruktur.**

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Prosentase penduduk yang berakses air limbah di Provinsi Bali	90,00 %	91,00 %	101,11
Prosentase penduduk yang berakses air minum di Provinsi Bali	87,00 %	85,00 %	97,70
Prosentase cakupan layanan pengelolaan sampah di Provinsi Bali	80,00 %	73,25%	97,67

SASARAN STRATEGIS 5**Meningkatnya kualitas pelayanan publik**

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Prosentase responden yang puas terhadap kualitas hasil layanan laboratorium pengujian dan alat berat	100,00 %	100,00 %	100,00
Prosentase responden yang puas terhadap pelayanan air limbah	100,00 %	100,00 %	100,00
Prosentase konsumen yang puas terhadap pelayanan air minum	100,00 %	90,50 %	90,50
Prosentase responden yang puas terhadap pelayanan pengolahan persampahan	100,00 %	60,00 %	60,00

SASARAN STRATEGIS 6**Meningkatnya kompetensi SDM penyelenggara Jasa Konstruksi**

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Jumlah Masyarakat Jasa Konstruksi yang berkompeten dan Bersertifikat di Provinsi Bali	350 orang	235 orang	90,38

3.2. ANALISIS CAPAIAN KINERJA**Sasaran Strategis 1 : Mantapnya kondisi Infrastruktur**

Pencapaian target kinerja atas sasaran ini terdiri dari 4 (empat) indikator kinerja adalah sebagai berikut :

1. Rasio jaringan irigasi dalam kondisi baik (%);
2. Jumlah penambahan kapasitas penyediaan air baku (m3);

3. Prosentase Jalan provinsi dalam kondisi mantap (baik dan sedang);
4. Prosentase kehandalan bangunan gedung negara;

Analisis capaian masing-masing indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut :

✓ **Rasio jaringan irigasi dalam kondisi baik (%)**

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Rasio jaringan irigasi dalam kondisi baik (%)	75,00%	71,51%	95,35%

Target yang ditetapkan adalah 75% . Dari tabel diatas dapat dilihat tingkat capaian dari indikator Rasio jaringan irigasi dalam kondisi baik adalah sebesar 71,51% dari target yang ditetapkan. Rasio Jaringan Irigasi dalam hal ini adalah panjang jaringan irigasi dalam kondisi baik dibagi panjang jaringan irigasi keseluruhan x 100%. Apabila dibandingkan dengan Tahun 2017, dimana Target sebesar 70% dan realisasi sebesar 68,62% sehingga capaiannya sebesar 97,14%, Dengan demikian capaian tahun 2018 lebih rendah dibandingkan dengan tahun lalu.

Apabila dikaitkan dengan target Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Bali, dimana target pada tahun 2018 sebesar 75,00% sedangkan capaian sampai tahun ini sebesar 71,51% sehingga target yang harus dicapai dalam 1 tahun kedepan sebesar 3,49%.

Untuk mencapai target tahun 2018 telah dilaksanakan pekerjaan pada kegiatan rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi sebagai berikut :

1. Peningkatan Jaringan Irigasi D.I. Tiyingtali di Kab. Buleleng
2. Peningkatan Jaringan Irigasi D.I. Palasari di Kab. Jembrana
3. Peningkatan Jaringan Irigasi D.I. Dwi Ekabuana di Kab. Bangli, Gianyar
4. Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Tembuku di Kab. Bangli
5. Peningkatan Jaringan Irigasi D.I. Banjarangkan di Kab. Klungkung
6. Peningkatan Jaringan Irigasi D.I. Balian di Kab. Tabanan
7. Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Benel di Kab. Jembrana
8. Peningkatan Jaringan Irigasi D.I. Gerana di Kab. Badung (DAK)
9. Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Apuan di Kab. Bangli
10. Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Padpadan di Kab. Gianyar

Selain pekerjaan diatas, untuk mencapai target indikator tersebut juga dilaksanakan pekerjaan Pengelolaan jaringan irigasi yang telah dibangun sebagai berikut :

1. Pemeliharaan tembok penyengker BG1 Bindu D.I. Oongan Kota Denpasar;
2. Perbaikan Rumah Pengamat Daerah Irigasi Tiyingtali di Kabupaten Buleleng;
3. Pemeliharaan Jaringan Irigasi DI Bekutel, Pemeliharaan Rumah Jaga Bendung dan Tembok Pagar DI Tembuku di Kabupaten Bangli;
4. Pemeliharaan Jaringan Irigasi DI Yeh Leh di Kabupaten Jembrana dan Pemeliharaan Tembok Pagar Kantor Pengamat DI Balian di Kabupaten Tabanan;
5. Pemeliharaan Tembok Pagar Rumah Jaga DI Gerana di Kabupaten Badung
6. Pemeliharaan Konstruksi Jaringan Irigasi (Pekerjaan Swakelola).

Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan tahun 2018 adalah secara umum penutupan air tidak ditepati oleh subak sesuai dengan yang telah disepakati dalam waktu sosialisasi pelaksanaan kegiatan, karena petani sudah melakukan kegiatan tanam padi, disamping itu kondisi topografi saluran irigasi cukup ekstrim dan jarak angkut bahan yang cukup jauh. Upaya yang perlu dilakukan pada tahun 2019 adalah perlu meningkatkan intensitas sosialisasi baik secara formal maupun tidak formal kepada petani/subak yang kena dampak pelaksanaan kegiatan sebagai media informasi bahwa akan dilaksanakan pekerjaan rehab Jaringan Irigasi

✓ ***Jumlah penambahan kapasitas penyediaan air baku (m3)***

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Jumlah penambahan kapasitas penyediaan air baku (m3)	160.000 m3	189.425 m3	118,39

Target yang ditetapkan pada tahun 2018 adalah 160.000 m3. Dari tabel diatas dapat dilihat tingkat capaian penambahan kapasitas penyediaan air baku adalah 189.425m3 atau sebesar 118,39% dari target yang ditetapkan. Apabila dibandingkan dengan Tahun 2017, dimana Target sebesar 155.000 m3 dan realisasi sebesar 189.425 m3 sehingga capaiannya sebesar 122,21%.

Dengan demikian capaian tahun 2018 lebih rendah dibandingkan dengan tahun 2017.

Apabila dikaitkan dengan target Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Bali, dimana target pada tahun 2018 sebesar 160.000 m³ sedangkan capaian sampai tahun ini sebesar 189.425 m³ sehingga target Renstra telah terlampaui sebesar 29.425 m³. Dapat dijelaskan bahwa kegiatan penambahan kapasitas penyediaan air baku pada tahun 2018 ini pendanaannya bertumpu pada APBN Kementerian PUPR/ Ditjen Sumber Daya Air (Balai Wilayah Sungai Bali-Penida) sedangkan dari APBD dianggarkan untuk pemeliharaan saja terhadap 4 (embung) yang dibangun melalui dana APBD Provinsi Bali.

Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan tahun 2018 adalah masalah pembebasan lahan/tanah. Upaya yang perlu dilakukan pada tahun 2019 adalah perlu koordinasi yang lebih intensif dengan kab./kota dan masyarakat sekitarnya mengenai manfaat pembangunan embung/waduk terkait dengan penambahan penyediaan air baku.

✓ Prosentase jalan provinsi dalam kondisi mantap (baik dan sedang)

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Prosentase Jalan provinsi dalam kondisi mantap (baik dan sedang)	85,54 %	80,81%	94,47

Target yang ditetapkan pada indikator Prosentase Jalan provinsi dalam kondisi mantap (baik dan sedang) pada tahun 2018 adalah 85,54 %.

Panjang ruas jalan Provinsi adalah 743,34 Km. Dari panjang jalan tersebut dalam kondisi baik 427,72 km, kondisi sedang 172,98 km dan kondisi rusak sepanjang 142,64 km. Apabila dibandingkan dengan kondisi di Tahun 2017, dimana Panjang ruas jalan Provinsi adalah 743,34 Km. Dari panjang jalan tersebut dalam kondisi baik 402,03 km, kondisi sedang 219,24 km dan kondisi rusak sepanjang 122,07 km.

Dari tabel diatas dapat dilihat tingkat capaian dari indikator Prosentase Jalan provinsi dalam kondisi mantap (baik dan sedang) adalah sebesar 80,81 % atau sebesar 94,47 % dari target yang ditetapkan. Apabila dibandingkan dengan Tahun 2017 dengan indikator yang sama, dimana Target sebesar 83,50 % dan realisasi

sebesar 83,58 % dan capaian sebesar 100,9 %. Dengan demikian capaian tahun 2018 lebih rendah dibandingkan dengan tahun 2017.

Apabila dikaitkan dengan target Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Bali, dimana target pada Renstra 2013-2018 sebesar 77,74% sedangkan capaian sampai tahun ini sebesar 80,81% sehingga target pada Renstra telah terlampaui sebesar 3,07%.

Untuk mencapai target yang ditetapkan tahun 2018 telah dilaksanakan kegiatan peningkatan jalan sepanjang 21,6 Km dari APBD Murni dan sepanjang 1,60 Km dan Peningkatan Jembatan 10 M dari DAK dengan uraian sebagai berikut :

1. Peningkatan Jalan Provinsi Bts. Buleleng - Kubutambahan 6.00 Km di Kabupaten Buleleng;
2. Peningkatan Jalan Provinsi Pupuan - Pekutatan 4.00 Km di Kabupaten Buleleng;
3. Peningkatan Jalan Provinsi Wanagiri – Munduk – Mayong 3.00 Km di Kabupaten Buleleng;
4. Peningkatan Jalan Provinsi Sp. Buruan – Batukaru 3.85 Km di Kabupaten Tabanan;
5. Peningkatan Jalan Provinsi Kedewatan - Payangan - Baturanyar 3.00 Km di Kabupaten Bangli;
6. Peningkatan Jalan Provinsi Jl. Merdeka 1.75 Km di Kabupaten Bangli;
7. Peningkatan Struktur Ruas Jalan Provinsi Paksebali- Selat 1.60 Km (DAK) di Kabupaten Karangasem;
8. Peningkatan Jembatan Tukad Yeh Hon 10 M (DAK) di Kabupaten Tabanan;

Selain pekerjaan peningkatan jalan juga dilaksanakan pekerjaan pemeliharaan berkala jalan provinsi sepanjang 13,87 Km dari APBD Murni dan sepanjang 3,14 Km dari DAK dengan uraian sebagai berikut :

1. Pemeliharaan Berkala Jalan Provinsi Pupuan - Seririt Sepanjang 5,50 Km;
2. Pemeliharaan Berkala Jalan Provinsi Antosari - Pupuan Sepanjang 4,00 Km;
3. Pemeliharaan Berkala Jalan Provinsi Rendang - Bts. Kota Amlapura Sepanjang 3,17 Km;
4. Pemeliharaan Berkala Jalan Provinsi Jln. Bhayangkara - Bts. Kota Amlapura Sepanjang 1,20 Km;
5. Pemeliharaan Berkala Jalan Provinsi Jln. Imam Bonjol, Jln. Teuku Umar - Bts. Kediri dan Bts. Kediri - Tanah Lot Sepanjang 2,00 Km.

6. Pemeliharaan Berkala Jalan Provinsi Pupuan - Seririt Sepanjang 2,03 km (DAK);
7. Pembuatan Jalan Inspeksi Jembatan Pada Ruas Jalan Provinsi;
8. Pemasangan Beton Kurus Pada Bahu Jalan Pada Ruas Jalan Provinsi di 9 Kab/Kota;
9. Pemeliharaan Berkala Jalan Provinsi Padangbai - Silayukti Sepanjang 1,10 Km (DAK);
10. Pemeliharaan Berkala Jalan Provinsi Bts. Kota Semarapura - Sp. Klotok Sepanjang 2,04 Km (DAK);

Pada kegiatan rehabilitasi/pemeliharaan rutin jalan dan jembatan provinsi juga dilaksanakan pekerjaan perkuatan tebing sebagai berikut :

1. Perkuatan Tebing dan Saluran pada Ruas jalan Provinsi Ruas Jalan Sp. Penelokan - Bts. Buleleng Km. 64+500 dan Km. 73+400
2. Perkuatan Tebing dan Saluran pada Ruas jalan Provinsi Ruas Jalan Wanagiri - Munduk - Mayong Km. 67+000
3. Perkuatan Tebing dan Saluran pada Ruas jalan Provinsi Ruas Jalan Wanagiri - Munduk - Mayong Km. 66+500
4. Perkuatan Tebing dan Saluran pada Ruas jalan Provinsi Ruas Jalan Sp. Petang - Sp. Kintamani Km. 36+150
5. Perkuatan Tebing dan Saluran pada Ruas jalan Provinsi Ruas Jalan Antosari - Pupuan Km. 57+000
6. Perkuatan Tebing dan Saluran pada Ruas jalan Provinsi Ruas Jalan Rendang - Bts. Kota Amlapura Km. 55+200 dan Km. 70+400
7. Perkuatan Tebing dan Saluran pada Ruas jalan Provinsi Ruas Jalan Surabrata - Blatungan - Kemoning Km. 64+400
8. Perkuatan Tebing dan Saluran pada Ruas jalan Bts. Kota Bangli - Nongan Km. 51+800 dan Km. 52+150
9. Perkuatan Tebing dan Saluran pada Ruas jalan Provinsi Ruas Jalan Petang - Batunya Km. 35+600
10. Perkuatan Tebing dan Saluran pada Ruas jalan Provinsi Ruas Jalan Buruan - Senganan - Pacung Km. 48+000
11. Perkuatan Tebing dan Saluran pada Ruas jalan Provinsi Ruas Jalan Wanagiri - Munduk - Mayong Km. 62+700
12. Perkuatan Tebing dan Saluran pada Ruas jalan Provinsi Ruas Jalan Antosari - Pupuan Km. 52+600 dan Km. 53+100

13. Perkuatan Tebing dan Saluran pada Ruas jalan Provinsi Ruas Jalan Sp. Tista - Lempuyang Km. 93+450
14. Perkuatan Tebing dan Saluran pada Ruas jalan Provinsi Ruas Jalan Jln. Penataran Agung (Besakih) Km. 60+400
15. Perkuatan Tebing dan Saluran pada Ruas jalan Provinsi Ruas Jalan Wanagiri - Munduk - Mayong Km. 62+712
16. Perkuatan Tebing dan Saluran pada Ruas jalan Provinsi Ruas Jalan Bts. Kediri - Belayu - Mengwi Km. 22+800
17. Perkuatan Tebing dan Saluran pada Ruas jalan Provinsi Ruas Jalan Petang - Batunya Km. 35+607
18. Perkuatan Tebing dan Saluran pada Ruas jalan Provinsi Ruas Jalan Petang - Batunya Km. 35+593
19. Perkuatan Tebing dan Saluran pada Ruas jalan Provinsi Ruas Jalan Paksewali - Selat Km. 53+075
20. Perkuatan Tebing dan Saluran pada Ruas jalan Provinsi Ruas Jalan Petang - Batunya Km. 37+000 (R) dan Km. 44+800 [R]
21. Perkuatan Tebing dan Saluran pada Ruas jalan Provinsi Ruas Jalan Petang - Batunya Km. 35+612
22. Perkuatan Tebing dan Saluran pada Ruas jalan Provinsi Ruas Jalan Wanagiri - Munduk - Mayong Km. 68+150 [R]
23. Perkuatan Tebing dan Saluran pada Ruas jalan Provinsi Ruas Jalan Sp. Penelokan - Bts. Buleleng Km. 64+700 dan Km. 65+750
24. Perkuatan Tebing dan Saluran pada Ruas jalan Provinsi Ruas Jalan Surabrata - Blatungan - Kemoning Km. 55+250 dan Km. 66+650
25. Perkuatan Tebing dan Saluran pada Ruas jalan Provinsi Ruas Jalan Paksewali - Selat Km. 42+300 dan Km. 43+450
26. Perkuatan Tebing dan Saluran pada Ruas jalan Provinsi Ruas Jalan Penataran Agung Besakih Km. 60+415
27. Perkuatan Tebing dan Saluran pada Ruas jalan Provinsi Ruas Jalan Buruan - Senganan - Pacung Km. 48+012
28. Perkuatan Tebing dan Saluran pada Ruas jalan Provinsi Ruas Jalan Sp. Penelokan - Bts. Buleleng Km. 79+200 dan Km. 85+000
29. Perkuatan Tebing dan Saluran pada Ruas jalan Provinsi Ruas Jalan Bts. Kota Bangli - Kayuambua Km. 43+450 dan Km. 43+550 [R]
30. Perkuatan Tebing dan Saluran pada Ruas jalan Provinsi Ruas Jalan Kedewatan - Payangan - Baturanyar Km. 43+000 dan Km. 45+000

31. Perkuatan Tebing dan Saluran pada Ruas jalan Provinsi Ruas Jalan Bts. Kota Bangli - Penelokan Km. 51+750 dan Km. 61+250

32. Perkuatan Tebing dan Saluran pada Ruas jalan Provinsi Ruas Jalan Wanagiri - Munduk - Mayong Km. 62+697

Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan tahun 2018 adalah seringnya turun hujan mengakibatkan banyak terjadi longsor khususnya pada ruas jalan yang berada kawasan rawan longsor, sehingga diperlukan penanganan berupa Perkuatan Tebing dan saluran yang lokasinya tersebar diseluruh kabupaten di Provinsi Bali. Permasalahan lainnya adalah keterbatasan anggaran untuk mendukung kegiatan pemeliharaan berkala maupun peningkatan ruas-ruas jalan provinsi yang berdampak pada masih terdapatnya ruas-ruas jalan provinsi yang belum bisa tertangani secara maksimal.

Upaya yang perlu dilakukan di tahun 2019 adalah melakukan pengawasan secara optimal dan memanfaatkan mandor-mandor jalan yang tersebar di seluruh kabupaten untuk lebih sigap dan cepat untuk menginformasikan apabila terjadi longsor pada ruas jalan provinsi, mengingat tingginya curah hujan yang terjadi yang sangat berdampak pada kondisi ruas jalan yang ada pada daerah-daerah rawan longsor. Penambahan anggaran dan penempatan SDM yang sesuai dengan kompetensinya akan membuat segala permasalahan yang ada dapat tertangani lebih cepat dan baik.

✓ *Prosentase kehandalan bangunan gedung negara*

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Prosentase kehandalan bangunan gedung negara	75,61 %	74,55%	98,59

Target yang ditetapkan pada tahun 2018 adalah 75,61 %. Jumlah bangunan gedung negara dan lingkungan di Provinsi Bali sebanyak 225 unit. Sampai tahun 2018 yang dalam kondisi baik sebanyak 142 unit. Dari tabel diatas dapat dilihat Prosentase kehandalan bangunan gedung negara dan lingkungan adalah sebesar 74,55 % atau sebesar 98,59 % dari target yang ditetapkan. Apabila dibandingkan dengan Tahun 2017 dengan indikator yang sama, dimana Target sebesar 65,00% dan realisasi sebesar 63,50 % sehingga capaiannya sebesar 97,69 %, Dengan demikian capaian tahun 2018 lebih tinggi jika dibandingkan dengan tahun 2017.

Apabila dikaitkan dengan target Review Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Bali, dimana target pada tahun 2018 sebesar 75,00% sedangkan capaian sampai tahun ini sebesar 74,55 % sehingga target belum tercapai sebesar 0,45%.

Untuk mencapai target Tahun 2018 telah dilaksanakan pekerjaan pada kegiatan penataan bangunan dan lingkungan sebagai berikut :

1. Penataan Pura Besakih, Kec. Rendang, di Kab. Karangasem
2. Penataan Pura Lempuyang, Kec. Abang di Kab. Karangasem
3. Penataan Pura Teratai Bang, Kec. Baturiti di Kab. Tabanan
4. Penataan Pura Ulun Danu Buyan, Kec. Sukasada di Kab. Buleleng
5. Penataan Pura Puncak Mangu, Kec. Petang di Kabupaten Badung
6. Pembangunan Wisma Pramuka di Bumi Perkemahan Margarana di Kab. Tabanan

Secara garis besar pelaksanaan paket pekerjaan tahun 2018 dapat berjalan dengan baik. Upaya yang perlu dilakukan pada tahun 2019 adalah memprioritaskan program kegiatan yang mendukung target renstra khususnya tentang kehandalan bangunan gedung Negara

Sasaran Strategis 2 : Meningkatnya pengendalian abrasi

Analisis dari pencapaian indikator kinerja dapat diuraikan sebagai berikut :

✓ Prosentase panjang pantai yang tertangani dari ancaman abrasi (%)

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Prosentase panjang pantai yang tertangani dari ancaman abrasi (%)	57,46 %	57,46%	100,00

Target yang ditetapkan pada tahun 2018 adalah 57,46 % . Dari tabel diatas dapat dilihat tingkat capaian dari panjang pantai yang tertangani dari ancaman abrasi adalah sebesar 57,46% atau sebesar 100% dari target yang ditetapkan. Apabila dibandingkan dengan Tahun 2017 dengan indikator yang sama, dimana Target sebesar 56,36% dan realisasi sebesar 57,60% sehingga capaiannya sebesar 102,20%, Dengan demikian capaian tahun 2018 lebih rendah dibandingkan dengan tahun 2017. Dari data tersebut diatas dapat dilihat

bahwa prosentase panjang pantai yang tertangani dari ancaman abrasi mengalami penurunan sebesar 0,14 % yang disebabkan oleh meningkatnya abrasi di sepanjang pantai yang ada di Bali

Apabila dikaitkan dengan target Renstra Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bali, dimana target pada tahun 2019 sebesar 57,46% sedangkan capaian sampai tahun ini sebesar 57,46%, hal ini mengingat dana yang ada untuk pelaksanaan penanganan abrasi sangat kecil dan hanya dimanfaatkan untuk melaksanakan peningkatan fungsi bangunan pengaman pantai yang telah ada, sehingga tidak secara signifikan dapat menambah prosentase penanganan panjang pantai dari ancaman abrasi.

Dapat disampaikan bahwa kegiatan pengamanan pantai yang telah tertangani sampai dengan tahun 2018 sepanjang 110,621 km yang pendanaannya sebagian besar bersumber dari APBN Kementerian PUPR/ Ditjen Sumber Daya Air (Balai Wilayah Sungai Bali-Penida) sedangkan yang bersumber dari APBD s/d tahun 2018 sepanjang 5,73 km. Untuk mencapai target yang ditetapkan Tahun 2018 Pemerintah Provinsi Bali telah melaksanakan pekerjaan pada kegiatan pengamanan pantai yaitu Pengamanan Pantai Julah dan Bon Dalem di Kab. Buleleng sepanjang 240 M' atau sepanjang 0,240 Km

Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pekerjaan adalah penggunaan akses/jalan masuk untuk mengangkut material milik desa adat sering dikomersilkan sehingga upaya yang dilakukan pada tahun-tahun berikutnya adalah perlu peningkatan koordinasi secara lebih intensif dengan desa adat setempat disamping itu perlu penambahan *sharing* pendanaan dari APBD Provinsi Bali terkait penanganan pengamanan pantai, karena pantai di Bali dari segi ritual keagamaan sangat diperlukan masyarakat sebagai salah satu pelestarian nilai-nilai budaya.

Untuk mendukung pencapaian sasaran strategis bidang Sumber Daya Air dan capaian target tahun 2018 melalui dana APBD Provinsi Bali telah dilaksanakan pekerjaan pada kegiatan perencanaan dan pengawasan teknis sumber daya air sebagai berikut :

1. Penyusunan Database Daerah Irigasi Kewenangan Provinsi Bali;
2. Evaluasi Kinerja Jaringan dan Detail Disain D.I Apuan, D.I. Bekutel dan D.I. Tembuku di Kabupaten Bangli, Gianyar dan Klungkung;
3. Evaluasi Kinerja Jaringan dan Detail Disain D.I Banjarangkan dan D.I. Padpadan di Kabupaten Klungkung, Gianyar dan Bangli;
4. Review dan Detail Desain Pantai Batu Mejan di Kab. Badung;

5. Pengawasan Peningkatan Jaringan Irigasi D.I. Tiyingtali di Kab. Buleleng;
6. Pengawasan Peningkatan Jaringan Irigasi D.I. Palasari di Kab. Jembrana;
7. Pengawasan Peningkatan Jaringan Irigasi D.I. Dwi Ekabuana di Kab. Bangli, Gianyar;
8. Pengawasan Peningkatan Jaringan Irigasi D.I. Banjarangkan di Kab. Klungkung;
9. Pengawasan Peningkatan Jaringan Irigasi D.I. Balian di Kab. Tabanan;
10. Pengawasan Pengamanan Pantai Bondalem dan Julah di Kabupaten Buleleng
11. Pengawasan Perkuatan Saluran Pembuang ke Danau Buyan di Kab. Buleleng;
12. Pengawasan Peningkatan Jaringan Irigasi D.I. Gerana di Kabupaten Badung (DAK).

Sasaran Strategis 3 : Meningkatnya pelaksanaan penataan ruang dan kawasan strategis provinsi

Pencapaian target kinerja atas sasaran ini dengan indikator kinerja adalah sebagai berikut :

1. Prosentase kesesuaian pelaksanaan infrastruktur dengan rencana tata ruang

Analisis dari pencapaian indikator kinerja dapat diuraikan sebagai berikut :

✓ Prosentase kesesuaian pelaksanaan infrastruktur dengan rencana tata ruang

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Prosentase kesesuaian pelaksanaan infrastruktur dengan rencana tata ruang	100,00 %	100,00 %	100,00

Target yang ditetapkan pada tahun 2018 adalah 100,00 %. Dari tabel diatas dapat dilihat tingkat capaian dari indikator Prosentase kesesuaian pelaksanaan infrastruktur dengan rencana tata ruang adalah sebesar 100,00% atau sebesar

100,00% dari target yang ditetapkan. Apabila dibandingkan dengan Tahun 2017 dengan indikator yang sama, dimana Target sebesar 100,00% dan realisasi sebesar 100,00% sehingga capaiannya sebesar 100,00%, Dengan demikian capaian tahun 2018 sama dengan capaian tahun 2017.

Untuk mencapai target tahun 2018 telah dilaksanakan pekerjaan pada kegiatan penyusunan rencana rinci tata ruang sebagai berikut :

1. Proses penyiapan dokumen kelengkapan administrasi dalam rangka persetujuan substansi terkait revisi terhadap Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2009-2029.
2. Penyusunan RTR Kawasan Daya Tarik Wisata Khusus (KDTWK) Bedugul Pancasari.
3. Sinkronisasi Peta Rencana Tata Ruang Kawasan Suci Pura Agung Besakih.
4. Penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur sebagai penjabaran/turunan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) Bali Tahun 2009-2029 dan Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Itjen Kemendagri Tahun Anggaran 2017.

Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan penyelenggaraan penataan ruang Tahun 2018 adalah :

- Kurangnya kapasitas sumberdaya manusia (SDM) dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dalam kegiatan penyusunan rencana rinci tata ruang bila dibandingkan beban kerja yang ada.
- Penghematan/rasionalisasi anggaran Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Provinsi Bali menyebabkan kurang optimalnya pelaksanaan kegiatan penyusunan rencana rinci tata ruang yang berdampak pada penurunan kualitas substansi kegiatan.
- Kurangnya koordinasi antara kabupaten/kota, provinsi dan pusat dalam bidang penataan ruang, sehingga terjadi ketidaksinkronan antara pengaturan ruang satu dengan lainnya.
- Kurangnya pemahaman masyarakat akan pentingnya penataan ruang, sehingga lebih mementingkan kepentingan ekonomi diatas kepentingan budaya dan lingkungan.
- Pengendalian pemanfaatan ruang belum berjalan dengan baik karena sistem, mekanisme, kewenangan, SDM dan instrumen yang diperlukan

belum dalam status siap, termasuk kesiapan masyarakat juga perlu mendapat perhatian.

Upaya yang perlu dilakukan pada tahun 2019 dalam program penyelenggaraan penataan ruang adalah sebagai berikut :

- Meningkatkan kompetensi dan kapasitas SDM di lingkungan Bidang Tata Ruang;
- Mendorong proses penyusunan RTRW yang tidak hanya bersifat *top-down* akan tetapi juga diimbangi dengan proses *bottom-up* sehingga tercipta sinergi antar kepentingan pusat dan daerah, maupun antara kepentingan pemerintah dan seluruh pelaku pembangunan serta memantapkan proses penyiapan kebijakan, program dan kegiatan di lingkungan Bidang Tata Ruang agar kedepan dapat sesuai dengan capaian Renstra Bidang Tata Ruang 2018-2023;
- Perlunya peningkatan jumlah anggaran pada kegiatan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan penataan ruang, sehingga jumlah NSPK dan KSP yang ditangani mencapai target yang ditetapkan di dalam Renstra 2018-2023;
- Melaksanakan proses penyusunan rencana tata ruang yang bersifat dinamis dan fokus kepada hal-hal yang strategis (*strategic planning*) serta mempertimbangkan kearifan lokal. Penyusunan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis provinsi dan kabupaten/kota serta meningkatkan koordinasi antara kabupaten/kota dan provinsi dalam penyelenggaraan penataan ruang;
- Mengembangkan konsep audit penataan ruang sebagai instrumen monitoring dan evaluasi atau pengendalian pelaksanaan rencana tata ruang dalam skala wilayah maupun kota;
- Melanjutkan penyiapan NSPM penyusunan rencana tata ruang (RTR) dan pemanfaatan ruang dan melakukan diseminasi, sosialisasi dan advokasi penyelenggaraan penataan ruang kepada seluruh pelaku pembangunan (pemerintah, legislatif dan kelompok-kelompok masyarakat);
- Meningkatkan kapasitas perencana baik dari sisi kualitas maupun kuantitas dan sistem informasi penataan ruang sebagai alat monitoring dan evaluasi penyelenggaraan penataan ruang bersama-sama dengan lembaga-lembaga pendidikan, asosiasi profesi dan LSM.

Sasaran Strategis 4 :**Meningkatnya Ketersediaan dan ketercukupan infrastruktur**

Pencapaian target kinerja atas sasaran ini terdiri dari 3 (tiga) indikator kinerja, meliputi :

1. Prosentase penduduk yang berakses air limbah di Provinsi Bali
2. Prosentase penduduk yang berakses air minum di Provinsi Bali
3. Prosentase cakupan layanan pengelolaan sampah di Provinsi Bali

Analisis dari pencapaian indikator kinerja dapat diuraikan sebagai berikut :

✓ ***Prosentase penduduk yang berakses air limbah di Provinsi Bali***

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Prosentase penduduk yang berakses air limbah di Provinsi Bali	90,00 %	91,00 %	101,11

Target yang ditetapkan pada tahun 2018 adalah 90,00 %. Dari tabel diatas dapat dilihat tingkat capaian dari indikator Prosentase penduduk yang berakses air limbah di Provinsi Bali adalah sebesar 91,00 % atau sebesar 101,11 % dari target yang ditetapkan. Apabila dibandingkan dengan Tahun 2017 dengan indikator yang sama, dimana Target sebesar 87,00 % dan realisasi sebesar 88,00 % sehingga capaiannya sebesar 101,15 %. Dengan demikian capaian tahun 2018 sedikit lebih rendah jika dibandingkan dengan tahun 2017.

Apabila dikaitkan dengan target Renstra Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bali, dimana target pada tahun 2018 sebesar 90,00% sedangkan capaian sampai tahun ini sebesar 91,00% sehingga target telah terlampaui sebesar 1,00 %. Untuk menunjang tercapainya target tahun 2018 tersebut melalui APBD Provinsi Bali dilaksanakan program/ kegiatan yaitu Pemasangan Pipa tersier dan Sambungan Pelanggan Air Limbah perpipaan terpusat di Kab. Badung dan Kota Denpasar. Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan tahun 2018 adalah terbatasnya jumlah *House Inlet* yang tersedia sehingga pemasangan sambungan pelanggan yang dapat dilayani juga terbatas. Upaya yang perlu dilakukan pada tahun 2019 adalah memprioritaskan pemasangan saluran tersier untuk memperbanyak *House Inlet* sehingga sambungan pelanggan lebih banyak bisa dilayani.

✓ **Prosentase penduduk yang berakses air minum di Provinsi Bali**

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Prosentase penduduk yang berakses air minum di Provinsi Bali	87,00 %	85,00 %	97,70

Target yang ditetapkan pada tahun 2018 adalah 87,00 %. Jumlah penduduk Provinsi Bali sebanyak 4.214.956 orang. Dari jumlah tersebut, berakses air minum sebanyak 3.551.943 orang. Tingkat capaian dari indikator Prosentase penduduk yang berakses air minum di Provinsi Bali adalah sebesar 85,00 % atau sebesar 97,70 % dari target yang ditetapkan. Apabila dibandingkan dengan Tahun 2017 dengan indikator yang sama, dimana Target sebesar 85,00% dan realisasi sebesar 76,56% sehingga capaiannya sebesar 90,07%, Dengan demikian capaian tahun 2018 lebih baik dibandingkan dengan tahun lalu.

Apabila dikaitkan dengan target Renstra Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bali, dimana target pada tahun 2018 sebesar 90,00% sedangkan capaian sampai tahun ini sebesar 85,00% sehingga target Renstra belum tercapai sebesar 5,00%.

Untuk menunjang tercapainya target Tahun 2017 melalui APBD Provinsi Bali dilaksanakan Program/ Kegiatan sebagai berikut :

1. Pengembangan SPAM Desa Pesinggahan Kec. Dawan Kab. Klungkung
2. Pengembangan SPAM Desa Les Kab. Buleleng
3. Pengembangan SPAM Guyangan di Kec.Nusa Penida, Kab. Klungkung

✓ **Prosentase cakupan layanan pengelolaan sampah di Provinsi Bali**

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Prosentase cakupan layanan pengelolaan sampah di Provinsi Bali	80,00 %	78,25%	97,81

Target yang ditetapkan pada tahun 2018 adalah 80,00 %. Dari tabel diatas dapat dilihat tingkat capaian dari indikator Prosentase cakupan layanan pengelolaan sampah di Provinsi Bali adalah sebesar 78,25% atau sebesar 97,81%

dari target yang ditetapkan. Apabila dibandingkan dengan Tahun 2017 dengan indikator yang sama, dimana Target sebesar 75,00% dan realisasi sebesar 73,25% sehingga capaiannya sebesar 97,67%, Dengan demikian capaian tahun 2018 lebih baik dibandingkan dengan tahun 2017.

Apabila dikaitkan dengan target Renstra Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bali, dimana target pada tahun 2018 sebesar 80,00% sedangkan capaian sampai tahun ini sebesar 78,25% sehingga target yang harus dicapai dalam setahun kedepan sebesar 2,94%.

Untuk mencapai target tahun 2018 telah dilaksanakan pekerjaan pada kegiatan Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan TPA Regional sebagai berikut :

1. Pengadaan Bulldozer di TPA Regional Bangli;
2. Pembangunan Tempat Pencucian Kendaraan Pengangkut Sampah di TPA Regional Bangli;
3. Perencanaan Konstruksi Jembatan Timbang;
4. Perencanaan Pembangunan Tempat Pencucian Kendaraan Pengangkut Sampah di TPA Regional Bangli;
5. Pengawasan Pembangunan Tempat Pencucian Kendaraan Pengangkut Sampah di TPA Regional Bangli.

Selain itu juga untuk mencapai target yang ditetapkan juga dilaksanakan pekerjaan pada kegiatan Pengelolaan Prasarana dan Sarana TPA Regional sebagai berikut :

1. Pembelian Material Tanah Penutup di TPA Regional Bangli;
2. Pemeliharaan TPA Regional Sarbagita;
3. Pemeliharaan TPA Regional Bangli;
4. Pengadaan Truk Tangki Air;
5. Pengadaan Mesin Kompresor dan Pencuci Alat Berat di TPA Regional Sarbagita dan Bangli;
6. Pembangunan Pagar di TPA Regional Bangli;
7. Perencanaan Pembangunan Pagar di TPA Regional Bangli;
8. Pengawasan Pembangunan Pagar di TPA Regional Bangli.

Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan tahun 2018 adalah kurangnya sarana dan prasarana pendukung pengolahan sampah dan tingkat kesadaran masyarakat untuk mengelola sampah dari sumbernya (*Reuse, Reduce, Recycle (3R)*)

masih rendah. Upaya yang perlu dilakukan pada tahun 2018 adalah menambah sarana dan prasarana pendukung pengolahan sampah dan koordinasi secara intensif untuk mendorong pemkab/pemkot melaksanakan sosialisasi tentang 3R (*Reuse, Reduce, Recycle*) guna meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mengelola sampah dari sumbernya.

Sasaran Strategis 5 : Meningkatnya kualitas pelayanan publik

Pencapaian target kinerja atas sasaran ini terdiri dari 4 (empat) indikator yaitu :

1. Prosentase responden yang puas terhadap kualitas hasil layanan laboratorium pengujian dan alat berat
2. Prosentase responden yang puas terhadap pelayanan air limbah
3. Prosentase konsumen yang puas terhadap pelayanan air minum
4. Prosentase konsumen yang puas terhadap pelayanan pengelolaan persampahan

Analisis capaian indikator kinerja dari sasaran ini adalah sebagai berikut :

✓ ***Prosentase responden yang puas terhadap kualitas hasil layanan laboratorium pengujian dan alat berat***

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Prosentase responden yang puas terhadap kualitas hasil layanan laboratorium pengujian dan alat berat	100,00 %	100,00%	100,00

Target yang ditetapkan pada tahun 2018 pada indikator Prosentase responden yang puas terhadap kualitas hasil layanan laboratorium pengujian dan alat berat adalah 100,00%. Jumlah responden yang menggunakan layanan laboratorium pengujian dan alat berat sebanyak 295 responden. Dari tabel diatas dapat dilihat tingkat capaian dari indikator Prosentase responden yang puas terhadap kualitas hasil layanan laboratorium pengujian dan alat berat adalah sebesar 100,00% dari target yang ditetapkan. Apabila dibandingkan dengan Tahun 2017 dengan indikator yang sama, dimana jumlah responden yang menggunakan layanan laboratorium dan alat berat sebanyak 280 responden, Target sebesar 100,00% dan

realisasi sebesar 100,00% sehingga capaiannya sebesar 100,00%, Dengan demikian capaian tahun 2018 sama baiknya dengan capaian tahun 2017.

Kegiatan yang dilakukan untuk mencapai target tahun 2018 yaitu :

- Pada Kegiatan Pelaksanaan Pelayanan Pengujian Tanah dan Bahan Bangunan dilaksanakan pekerjaan Pengadaan alat-alat laboratorium seperti *Sand Cone Test Set*, Timbangan Digital, *Tool Box* dan Alat Ukur.
- Pada kegiatan Pelaksanaan Pelayanan alat berat dilaksanakan pekerjaan Pengadaan Mesin Las, Pengadaan *Tool Kit Box* dan Pengadaan Katrol kaki Tiga.
- Pada Kegiatan Pelaksanaan Pelayanan Pengujian Kualitas Air.

Permasalahan yang dihadapi yaitu Laboratorium pada UPT. Balai Peralatan dan Pengujian belum ter-Akreditasi sehingga tidak memiliki daya saing dan Kurangnya Sumber Daya Manusia yang memiliki kompetensi di bidang laboratorium kualitas air maupun di bidang tanah dan bahan bangunan.

Upaya yang perlu dilakukan pada tahun 2018 adalah :

- Mengikuti Uji Profesi secara berkala yang diselenggarakan oleh Puslitbang Kementerian PU-PR;
- Menyiapkan langkah-langkah menuju proses Akreditasi (KAN) Laboratorium (ISO 17025);
- Mengusulkan pendidikan dan pelatihan (Diklat) maupun Bimtek untuk memenuhi standar kompetensi Sumber Daya Manusia di bidang Laboratorium dan Operator alat berat; dan
- Melakukan peremajaan alat-alat laboratorium untuk mendukung pencapaian kinerja laboratorium.

✓ Prosentase responden yang puas terhadap pelayanan air limbah

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Prosentase responden yang puas terhadap pelayanan air limbah	100,00 %	100%	100

Target yang ditetapkan tahun 2018 untuk indikator Prosentase responden yang puas terhadap pelayanan air limbah adalah 100,00% hal tersebut terkait dengan lancarnya aliran air limbah yang mengalir dari hulu ke hilir, keluhan masyarakat sebanyak kurang lebih 1.242 keluhan namun telah

berhasil ditangani dan mereka puas terhadap pelayanan yang diberikan. Apabila dibandingkan dengan Tahun 2017 dengan indikator yang sama, dimana Target sebesar 100,00% dan realisasi sebesar 100,00% sehingga capaiannya sebesar 100,00%, Dengan demikian capaian tahun 2018 sama baiknya dibandingkan dengan tahun 2017. Untuk tingkat kepuasan setiap tahunnya menggunakan target yang sama yaitu 100,00%, namun yg berbeda adalah jumlah responden yang digunakan.

Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan tahun 2018 adalah sebagai berikut :

- a. Kesadaran masyarakat untuk tidak membuang sampah sembarangan perlu semakin ditingkatkan karena sebagian besar permasalahan karena tersumbatnya jaringan perpipaan akibat sampah yang masuk ke dalam sistem, selain itu sampah ini menyebabkan motor-motor pompa pada beberapa *wetpit* terbakar, sehingga air limbah tidak bisa mengalir dan meluber ke jalan raya. Oleh karena itu, diperlukan kegiatan sosialisasi dan edukasi secara berkesinambungan kepada masyarakat/pelanggan;
- b. Selain sampah, penyumbatan pada saluran air limbah diakibatkan oleh lemak/minyak yang masuk ke dalam saluran. Secara umum pelanggan kategori restaurant/rumah makan sudah memasang perangkap lemak (*grease trap*) pada saluran buangnya sebelum masuk kedalam jaringan pipa air limbah, namun kenyataannya lemak/minyak masih lolos, akibat lemak yang menumpuk di dalam *grase trap*. Oleh karena itu, pelanggan harus teratur melaksanakan pemeliharaan dan pengangkatan lemak dari *grase trap* dengan teratur agar tidak mengeras dan menyumbat di dalam jaringan;
- c. Sistem Instalasi Pengolahan Lumpur (IPLT) belum optimal bekerja akibat kandungan lemak yang masuk kedalam IPLT tersebut sangat tinggi, sehingga merusak sistem pengolahan IPLT;
- d. Kolam sedimentasi pada IPAL sudah dipenuhi oleh endapan sedimen, perlu dilaksanakan pengurasan sehingga kolam sedimentasi dapat berfungsi dengan baik;
- e. Beberapa jaringan pipa air limbah baik pipa baja bertekanan maupun pipa beton (RC) di beberapa lokasi mengalami korosi sehingga pipa mengalami kesusakan (kebocoran);
- f. Masih kurangnya tenaga lapangan/tenaga teknis yang bertugas untuk melakukan pemeliharaan jaringan pipa, *wetpit*, dan sistem kelistrikan pompa.

Upaya yang perlu dilakukan pada tahun 2019 adalah sebagai berikut :

- a. Mengadakan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat baik melalui media cetak maupun media audio visual;
- b. Melakukan monitoring secara rutin oleh petugas UPT PAL terhadap pemeliharaan *grase trap* di setiap hotel dan restaurant;
- c. Pengurasan Kolam sedimentasi dilakukan secara periodik sehingga kondisi *microorganism* di kolam tersebut sehat;
- d. Kondisi aerator yang berjumlah 21 tersebut harus tetap dipantau dengan baik dan dalam beroperasi dengan baik;
- e. Berkoordinasi dengan Satker PPLP Bali agar menyempurnakan sistem IPLT yang sudah terbangun;
- f. Menambah tenaga teknis pada bagian pemeliharaan jaringan pipa, khususnya untuk pembersihan setiap wetpit secara rutin dan memberikan pelatihan sehingga tenaga di lapangan tersebut memiliki ketrampilan yang baik untuk melaksanakan pemeliharaan;
- g. Melaksanakan perbaikan dan rehabilitasi jaringan pipa air limbah yang rusak dan pompa yang terbakar akibat tersumbat sampah;
- h. Melengkapi peraturan perundang-undangan dalam penerapan PPK BLUD sebagai dasar legalitas pengelolaan anggarannya.

✓ **Prosentase responden yang puas terhadap pelayanan air minum**

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Prosentase konsumen yang puas terhadap pelayanan air minum	100,00 %	90,50 %	90,50

Target yang ditetapkan untuk indikator Prosentase konsumen yang puas terhadap pelayanan air minum adalah 100,00%. Jumlah responden yang menggunakan pelayanan air minum sebanyak 5 responden yaitu PDAM Badung, Denpasar, Gianyar, Karangasem dan Klungkung dan yang menyatakan puas sebanyak 5 responden, untuk tingkat capaian Prosentase konsumen yang puas terhadap pelayanan air minum adalah sebesar 90,50 %. Apabila dibandingkan dengan Tahun 2017 dengan indikator yang sama, dimana Target sebesar 100% dan

realisasi sebesar 90,50% sehingga capaiannya sebesar 90,50 %, Dengan demikian capaian tahun 2018 sama dengan capaian tahun 2017.

Pelaksanaan kegiatan dilaksanakan oleh UPT. Pengelolaan Air Minum dengan melaksanakan Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Air Minum dengan Kegiatan Pelayanan Air Minum Pada BLUD, untuk mencapai target Tahun 2018 dilaksanakan :

- Pemeliharaan Jaringan Air dan Jaringan Listrik SPAM;
- Belanja Bahan Kimia untuk Operasional SPAM;
- Belanja Asesoris Pipa sebagai Suku Cadang;
- Penyediaan Biaya Rekening Listrik untuk Operasional SPAM;
- Pengadaan Sarana untuk Operasional SPAM :
 - Pengadaan Elektri Klorinasi di Reservoir Buduk SPAM Penet
 - Pengadaan Alat-alat Uji Kualitas Air
 - Pengadaan dan Pemasangan *Water Meter* di Jalur By Pass SPAM Penet

Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan tahun 2018 adalah sebagai berikut :

- a. Belum optimalnya pendistribusian air dari Sistem Pengolahan Air Minum (SPAM) Petanu dari kapasitas maksimal 300 liter/detik saat ini baru mencapai 125 liter/detik.
- b. Pasokan air SPAM Penet dari Tukad Penet sering terganggu akibat sering bermasalahnya Bendung Karet pada Long Storage.
- c. Pengaliran air SPAM Telagawaja sering terganggu akibat sering bocornya Pipa Induk (Transmisi) khususnya Jalur Transmisi di Daerah Putung, Desa Duda Timur, Karangasem.
- d. Pada wilayah pengaliran SPAM Telagawaja dan Guyangan baru sebagian masyarakat menjadi pelanggan PDAM, sehingga sebagian masyarakat masih menerima air secara gratis. Hal ini menimbulkan kecemburuan sosial diantara masyarakat.

Upaya yang perlu dilakukan pada tahun 2019 adalah sebagai berikut :

- a. Melakukan optimalisasi Jaringan Distribusi Utama SPAM Petanu dengan memasang Pompa Booster.
- b. Melakukan kordinasi kepada Kepala BWS-Bali Penida untuk mempercepat penggantian Karet pada Bendung Karet Tukad Penet serta optimalisasi sarana penunjang Bendung.

- c. Membuat usulan kepada BWS-Bali Penida untuk mengkaji secara teknis khususnya Jalur Transmisi di Daerah Putung, Desa Duda Timur.
- d. Mendorong PDAM Karangasem dan PDAM Klungkung untuk mengembangkan Jaringan Sambungan Rumah (SR) pada wilayah-wilayah potensial.

✓ ***Prosentase konsumen yang puas terhadap pelayanan pengelolaan persampahan***

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Prosentase konsumen yang puas terhadap pelayanan pengelolaan persampahan	100,00 %	65,00 %	65,00

Target yang ditetapkan pada tahun 2018 adalah 100,00%. Dari tabel diatas dapat dilihat tingkat capaian dari indikator Prosentase konsumen yang puas terhadap pelayanan pengelolaan persampahan adalah sebesar 65,00% dari target yang ditetapkan. Hal ini dapat diperkirakan bahwa tingkat kepuasan konsumen dari berkurangnya complain dan antrean panjang truk-truk sampah pada zona pembuangan, yang disebabkan karena sudah ada penambahan alat berat dan sudah dibangunnya tempat cuci kendaraan pengangkut sampah. Apabila dibandingkan dengan Tahun 2017 dengan indikator yang sama, dimana Target sebesar 100,00% dan realisasi sebesar 60,00% sehingga capaiannya sebesar 60,00%, Dengan demikian capaian tahun 2018 lebih baik dibandingkan dengan tahun lalu. Untuk mencapai target tahun 2018 telah dilaksanakan Revitalisasi TPA Regional khususnya di TPA Regional Sarbagita yang dimulai pada bulan Desember 2017 dengan bantuan dana APBN melalui Satker Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI.

Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan tahun 2018 adalah kurangnya Sumber Daya Manusia yang berkompeten dalam pengelolaan sampah. Upaya yang perlu dilakukan pada tahun 2019 adalah peningkatan Sumber daya Manusia yang berkompeten dalam pengelolaan sampah dan dibangunnya pengolahan sampah dengan *high* teknologi yang ramah lingkungan, salah satunya WTE (*Waste to Energy*).

Sasaran Strategis 6 :**Meningkatnya kompetensi SDM penyelenggara Jasa Konstruksi**

Pencapaian target kinerja atas sasaran ini terdiri dari 1 (satu) indikator yaitu :
Jumlah SDM jasa konstruksi yang bersertifikat

✓ Jumlah SDM jasa konstruksi yang bersertifikat

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Jumlah SDM Jasa konstruksi yang bersertifikat	260 orang	235 orang	90,38

Target yang ditetapkan pada tahun 2018 adalah 3500 orang, namun pada anggaran Perubahan target mengalami perubahan menjadi 260 orang. Dari tabel diatas dapat dilihat realisasinya sebesar 235 orang, sehingga capaian dari target yang ditetapkan sebesar 90,38%. Jika dibandingkan dengan tahun 2017, dimana Target sebesar 230 orang dan realisasi 200 orang sehingga capaiannya sebesar 86,95%. Dengan demikian capaian pada tahun 2018 lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya.

Kendala yang dihadapi pada tahun 2018 adalah sebagai berikut :

- Belum optimal dan tertibnya penyelenggaraan Jasa Konstruksi
- Tidak semua Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum di Pemkab/Pemkot se Bali memiliki unit kerja dan alokasi anggaran untuk menyelenggarakan urusan pembinaan jasa konstruksi.
- Rendahnya jumlah tenaga kerja jasa konstruksi yang bersertifikat.
- Rendahnya pemahaman penggunaan dan pelaku jasa konstruksi terhadap peraturan atau NSPK yang mengatur jasa konstruksi.

Upaya yang perlu dilakukan di tahun 2019 adalah sebagai berikut :

- Pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan jasa konstruksi yang lebih maksimal

- b. Untuk pemerintah kabupaten/kota yang belum memiliki unit kerja kewenangannya untuk sementara waktu diambil alih oleh Pemerintah Provinsi.
- c. Mendorong upaya percepatan sertifikasi tenaga kerja jasa konstruksi dengan pendanaan pemerintah maupun swasta.
- d. Sosialisasi peraturan perundangan atau NSPK yang mengatur jasa konstruksi yang berkesinambungan.

3.3. REALISASI KEUANGAN

Realisasi anggaran dan kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Bali adalah sebagai berikut :

1. Pagu tahun 2018 adalah sebesar Rp. 342.530.765.816,73 (Tiga ratus empat puluh dua milyar lima ratus tiga puluh juta tujuh ratus enam puluh lima ribu delapan ratus enam belas koma tujuh puluh tiga rupiah), dengan perincian sebagai berikut :
 - Belanja pegawai Rp. 8.299.080.000,00
 - Belanja barang /jasa Rp. 103.150.693.549,36
 - Belanja Modal Rp. 231.080.992.267,37
2. Realisasi anggaran pada per 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp. 325.132.946.622,52 (tiga ratus dua puluh lima milyar seratus tiga puluh dua juta Sembilan ratus empat puluh enam ribu enam ratus dua puluh dua poin lima puluh dua rupiah) atau sebesar 94,92% dari pagu anggaran, dengan perincian sebagai berikut :
 - Belanja pegawai Rp. 7.988.572.500,00
 - Belanja barang /jasa Rp. 95.007.935.171,52
 - Belanja Modal Rp. 222.136.438.951,00

Realisasi Anggaran Per Program Tahun Anggaran 2018

No.	Program	Anggaran (Rp.)	Relisasi	
			Anggaran (Rp.)	%
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	2.577.200.000,00	2.280.278.918,00	88,48
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	3.998.146.752,00	3.716.300.410,00	92,95
3	Program Peningkatan Kualitas dan Penyebarluasan Informasi	167.600.000,00	137.227.950,00	81,88
4	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	167.344.676.000,00	167.228.482.192,00	99,93
5	Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	117.498.581.600,00	114.268.060.671,00	97,25
6	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya	12.737.217.208,00	10.565.668.876,00	82,95
7	Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, danau dan Sumber Daya Air Lainnya	3.614.867.000,00	3.371.130.985,00	93,26
8	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	37.706.294.208,00	16.400.314.218,00	43,49
9	Program Pengendalian Banjir/Abrasi	3.491.299.000,00	3.479.271.900,00	99,66
10	Program Perencanaan Tata Ruang	921.985.812,00	853.788.148,00	92,60
11	Program Penataan Bangunan	7.597.328.604,00	6.192.847.295,00	81,51
12	Pendayagunaan Perencanaan Pengelolaan dan Pelaksanaan Pengawasan ke PU-an	150.000.000,00	132.097.607,00	88,07
13	Program kehumasan Ke-PU-an	150.000.000,00	144.420.000,00	96,28
14	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	28.867.497.208,00	25.904.612.417,00	89,74
15	Program Perencanaan dan Pengawasan Bidang Cipta Karya	3.290.096.604,00	3.133.082.829,00	95,23
16	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	2.758.000.000,00	2.705.401.022,00	98,09
17	Program Pengembangan Jalan dan Jembatan	8.397.360.000,00	7.973.498.100,00	94,95
18	Program Pemanfaatan Ruang	314.657.208,00	205.765.398,00	65,39
19	Pengendalian Pemanfaatan Ruang	367.732.208,00	335.626.270,00	91,27
20	Pembinaan Jasa Konstruksi	1.264.143.020,00	800.386.657,00	63,31
Total		342.530.765.816,73	325.132.946.622,52	94,92

Adapun penjelasan dari tabel diatas adalah sebagai berikut :

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Bali di tahun 2018 melaksanakan sebanyak 20 program yang terdiri dari 74 kegiatan. Pagu anggaran pada tahun ini adalah sebesar Rp. 342.530.765.816,73 dimana realisasi anggarannya sebesar Rp. 325.132.946.622,52 atau sebesar 94,92%

Anggaran dan Realisasi pada masing-masing bidang
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provnsi Bali 2018

No	Uraian	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
I.	Sekretariat	5.739.999.748,37	5.075.417.392,00	88,42
II.	Bidang Bina Konstruksi	1.571.572.080,00	1.176.507.311,00	74,86
III.	Bidang Sumber Daya Air	35.936.562.617,00	32.558.402.502,52	90,60
IV.	Bidang Bina Marga	197.995.978.394,87	193.611.308.196,00	97,79
V.	Bidang Cipta Karya	44.796.260.410,49	39.142.315.748,00	87,38
VI.	Bidang Tata Ruang	2.333.475.912,00	2.160.975.368,00	92,61
VII.	UPT. Balai Peralatan dan Pengujian	1.607.397.080,00	1.416.860.834,00	88,15
VIII.	UPT. Pengelolaan Air Minum	26.621.409.240,00	26.142.727.426,00	98,20
IX.	UPT. Pengelolaan Air Limbah	19.029.314.416,00	17.266.252.681,00	90,74
X.	UPT. Pengelolaan Sampah	6.898.795.918,00	6.582.179.164,00	95,41
	Jumlah total	342.530.765.816,73	325.132.946.622,52	94,92

Anggaran dan Realisasi Pendapatan dan Belanja Tahun 2018
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Bali

No	Uraian	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
A	Pendapatan			
	1. Pendapatan Asli Daerah	25.218.600.000,00	36.106.915.206,72	143,18
	Total Pendapatan	25.218.600.000,00	36.106.915.206,72	143,18
B	Belanja			
	1. Belanja Tidak Langsung	33.252.190.807,00	27.660.339.863,00	83,18

	2. Belanja Langsung :	342.530.765.816,73	325.132.946.622,52	94,92
	a. Belanja Pegawai	8.299.080.000,00	7.988.572.500,00	96,26
	b. Belanja Barang dan Jasa	103.150.693.549,36	95.007.935.171,52	92,11
	c. Belanja Modal	231.080.992.267,37	222.136.438.951,00	96,13
	Total Belanja	375.782.956.623,73	352.793.286.485,52	93,88
	Surplus/Defisit	350.564.356.623,73	316.686.371.278,80	90,34

Adapun penjelasan dari tabel diatas adalah sebagai berikut :

1. Realisasi Pendapatan

▪ Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Bali per 31 Desember 2018 adalah sebesar 25.218.600.000,00 yang merupakan pendapatan yang berasal dari hasil retribusi daerah dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Jika dibandingkan dengan jumlah pendapatan Asli Daerah tahun 2017 sebesar Rp. 17.764.238.400,00 pendapatan tahun 2018 lebih besar dari pendapatan tahun sebelumnya.

2. Realisasi Belanja

▪ Belanja Tidak Langsung

Pagu anggaran untuk Belanja Tidak Langsung Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Bali adalah sebesar Rp. 33.252.190.807,00 dimana realisasi per 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp. 27.660.339.863,00 atau sebesar 83,18% dari pagu anggaran. Apabila dibandingkan dengan tahun 2017 realisasi tahun 2018 lebih tinggi, dimana realisasi tahun 2017 sebesar Rp. Rp. 27.994.881.757,00 atau sebesar 90,03%.

▪ Belanja Langsung

Belanja Langsung terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang/Jasa dan Belanja Modal. Pada tahun 2018 pagu anggaran adalah sebesar Rp. 342.530.765.816,73 sedangkan realisasinya adalah sebesar Rp. 325.132.946.622,52 atau sebesar 94,92% dari pagu anggaran. Apabila dibandingkan dengan tahun 2017 realisasi tahun 2018 sedikit lebih tinggi dari realisasi tahun 2017 dimana realisasinya sebesar Rp. 369.828.261.863,00 atau sebesar 91,72%.

Sisa anggaran yang tidak terserap dari rencana dikarenakan adanya efisiensi berupa dana sisa lelang dari paket pekerjaan yang dikontrakkan dan terdapat sisa anggaran dari paket pekerjaan akibat adanya putus kontrak karena kondisi *force majeure* akibat bencana erupsi gunung agung.

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas PUPR Provinsi Bali Tahun 2018 adalah bentuk pertanggungjawaban Kepala Perangkat Daerah terhadap Perjanjian Kinerja 2018 yang telah ditetapkan di awal tahun anggaran dan sekaligus merupakan media akuntabilitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan pengelolaan sumber daya dan kebijakan pada lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Bali.

Capaian indikator kinerja terhadap 6 (enam) sasaran strategis yang telah ditetapkan, menjadi tolok ukur keberhasilan dari apa yang ditetapkan di awal tahun anggaran. Capaian dari masing-masing indikator sebagian besar diatas 97%, walaupun masih terdapat beberapa capaian yang lebih kecil dari 91%, namun semua kegiatan dapat berjalan dengan baik. Capaian ini akan dijadikan pedoman pada apa yang akan direncanakan dan ditetapkan pada tahun anggaran berikutnya, untuk mencapai target Renstra SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Bali tahun 2014-2018. Realisasi Anggaran Belanja Langsung yang bersumber dari dana APBD Provinsi Bali, pagu sebesar Rp. 342.530.765.816,73 dan terealisasi sebesar Rp. 325.132.946.622,52 atau sebesar 94,92% sehingga terjadi efisiensi sebesar 5.08 %.

LKjIP Tahun 2018 selain menyampaikan capaian pada tahun berjalan, juga membandingkan capaian indikator kinerja dengan tahun sebelumnya dan termasuk juga perbandingan serapan anggarannya. Untuk meningkatkan pencapaian kinerja kegiatan, maka hal-hal yang perlu diupayakan untuk tahun mendatang di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Bali adalah sebagai berikut :

1. Masih perlu ditingkatkan koordinasi dan komunikasi tentang perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan dengan pihak terkait, baik dengan pemerintah kabupaten/kota, Pemerintah Pusat

maupun dengan apraiser agar pencapaian sasaran bisa berjalan sesuai dengan yang direncanakan;

2. Meningkatkan intensitas forum diskusi antar bidang untuk lebih memahami tugas pokok dan fungsi, meningkatkan sinergitas program kegiatan antar sektor, peningkatan kualitas SDM, serta penyamaan mengenai tata cara pelaksanaan kegiatan maupun evaluasi pelaksanaan fisik serta realisasi keuangan;
3. Penyusunan OE (*Owner Estimate*) yang lebih cermat, memperhatikan kondisi lingkungan dimana kegiatan akan dilaksanakan dengan mempertimbangkan unsur-unsur efisien, efektif, transparan dan akuntabel;
4. Dalam merumuskan rencana anggaran perlu memperhatikan program/kegiatan prioritas, terutama yang telah tertuang dalam Indikator Kinerja Utama sehingga menjadi tolak ukur teknis pencapaian keberhasilan kegiatan pada tahun mendatang.

LAMPIRAN I

Struktur Organisasi Dinas PUPR Provinsi Bali

STRUKTUR ORGANISASI

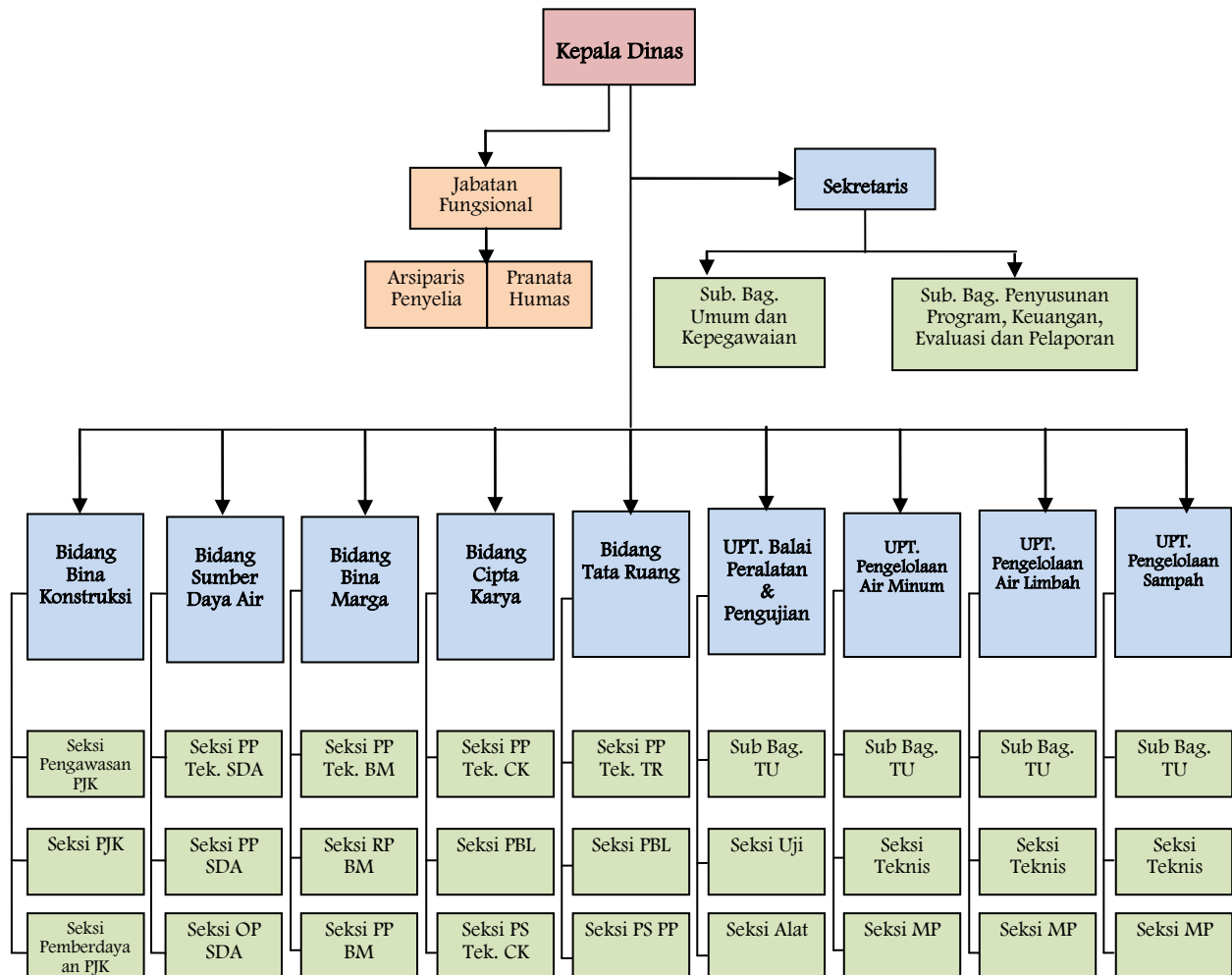


Diagram 1.1.

Struktur Organisasi Tahun 2018

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas PUPR Provinsi Bali

LAMPIRAN II

Perjanjian Kinerja Tahun 2018



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : IR. I NYOMAN ASTAWA RIADI, MSI

Jabatan : KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
PROVINSI BALI

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : MADE MANGKU PASTIKA

Jabatan : GUBERNUR BALI

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,
GUBERNUR BALI

MADE MANGKU PASTIKA

Denpasar, 3 Januari 2018

Pihak Pertama,

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG
PROVINSI BALI




IR. I NYOMAN ASTAWA RIADI, MSI.
Pembina Utama Muda
NIP. 19600916 198012 1 002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROVINSI BALI

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Mantapnya kondisi Infrastruktur	1 Rasio jaringan irigasi dalam kondisi baik	75,00%
		2 Jumlah kapasitas penyediaan air baku	160.000 M3
		3 Prosentase Jalan Provinsi dalam kondisi mantap (baik dan sedang)	85,54%
		4 Prosentase kehandalan bangunan gedung negara	75,61%
2	Meningkatnya pengendalian abrasi	5 Prosentase panjang pantai yang tertangani dari ancaman abrasi	57,46%
3	Meningkatnya pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis provinsi	6 Prosentase kesesuaian pelaksanaan infrastruktur dengan rencana tata ruang	100%
4	Meningkatnya ketersediaan dan ketercukupan insfrastruktur.	7 Prosentase penduduk yang berakses air limbah di Provinsi Bali	90,00%
		8 Prosentase penduduk yang berakses air minum di Provinsi Bali	87,00%
		9 Prosentase cakupan layanan pengelolaan sampah di Provinsi Bali	80,00%
5	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	10 Prosentase responden yang puas terhadap kualitas hasil layanan laboratorium pengujian dan alat berat	100,00%
		11 Prosentase responden yang puas terhadap pelayanan air limbah	100,00%
		12 Prosentase responden yang puas terhadap pelayanan air minum	100,00%
		13 Prosentase responden yang puas terhadap pelayanan pengelolaan persampahan	100,00%
6	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan jasa konstruksi	14 Jumlah Masyarakat Jasa Konstruksi yang Berkompeten dan Bersertifikasi di Provinsi Bali	350 Orang

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1	Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi,rawa dan jaringan pengairan lainnya	Rp 29.348.700.664,00	APBD/DAK
2	Program pengembangan, pengelolaan dan Konversi sungai, danau dan sumber daya air Lainnya	Rp 6.365.583.416,00	APBD/DAK
3	Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Rp 101.950.936.580,00	APBD/DAK
4	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Rp 104.593.831.420,00	APBD/DAK
5	Program Pengembangan Jalan dan Jembatan	Rp 7.012.504.895,00	APBD/DAK
6	Program Penataan Bangunan	Rp 28.008.628.832,00	APBD
7	Program Pengendalian Banjir/Abrasi	Rp 7.327.175.416,00	APBD
8	Program Perencanaan Tata Ruang	Rp 987.943.248,00	APBD
9	Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah	Rp 21.367.257.664,00	APBD
10	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Rp 6.626.414.000,00	APBD

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
11	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Rp 40.515.672.080,00	APBD
12	Program Perencanaan dan Pengawasan Bidang Cipta Karya	Rp 2.612.943.248,00	APBD
13	Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Rp 608.628.832,00	APBD
14	Program Pemanfaatan Ruang	Rp 408.628.832,00	APBD
15	Pembinaan Jasa Konstruksi	Rp 1.571.572.080,00	APBD

Jumlah Anggaran : Rp 367.492.850.600,00

Denpasar, 3 Januari 2018

Gubernur Bali,



MADE MANGKU PASTIKA



Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Bali

Ir. I NYOMAN ASTAWA RIADI, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19600916 198012 1 002



LKjIP

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Bali